

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA

(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Tim Peneliti STPN, 2015

Penyunting
Widhiana H. Puri

STPN Press, 2015

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA
(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:

STPN Press, Desember 2015
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Bekerja Sama dengan
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penulis: Tim Peneliti Strategis STPN 2015
Penyunting: Widhiana H. Puri
Layout: Nanjar Tri Mukti
Disain Cover: Nazir

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA
(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

STPN Press, 2015
xiv + 238 hlm.: 16 x 24 cm
ISBN: 602789427-x
ISBN: 9786027894273

Tidak diperjualbelikan
diperbanyak untuk
kepentingan pendidikan
dan kalangan sendiri



RELASI KUASA DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Strategi Pertanian Pemerintah Desa Prigelan Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo)

Oleh Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto

A. Pendahuluan

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya (lihat Thomas, 2004:10).

Ketika suatu pihak “memainkan” relasi kuasa, untuk pencapaian suatu tujuan tertentu, maka peluang resistensi segera muncul. Tetapi upaya ini diperlukan, karena relasi kuasa memberi kesempatan kepada pihak yang “memainkan” untuk mengambil manfaat darinya. Sebagai contoh, ketika strategi pertanian diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan, maka ada “kewajiban” Pemerintah Desa Prigelan untuk memainkan relasi kuasa.

Elizabeth Walter (2004) menjelaskan, bahwa strategi (*strategy*) berkaitan dengan rencana dan tindakan. Dalam kaitannya dengan rencana (*plan*), strategi dikenali sebagai suatu rencana yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Sementara itu, dalam kaitannya dengan tindakan (*act*), strategi dikenali sebagai suatu tindakan dalam merencanakan pencapaian sesuatu.

Dalam konteks pertanahan diketahui, bahwa Pemerintah Desa Prigelan menerapkan suatu strategi tertentu, yang kemudian dikenali sebagai “strategi pertanahan”. Konteks ini memberi makna “strategi”, sebagai berikut: (1) suatu rencana pertanahan yang digunakan oleh Pemerintah Desa Prigelan untuk memberdayakan petani, atau (2) suatu tindakan pertanahan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Prigelan dalam memberdayakan petani.

Untuk mewujudkan kesejahteraan, para petani membutuhkan dukungan Pemerintah Desa Prigelan, khususnya dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk strategi pertanahan, yang memberdayakan petani. Saat strategi pertanahan diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan, saat itulah terjadi relasi kuasa antara Pemerintah Desa Prigelan dengan para petani, termasuk dengan elit petani (Ketua Kelompok Tani dan Ketua Gabungan Kelompok Tani). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan judul, “Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo).”

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti lain, seperti: *Pertama*, Samuel Popkin, yang pada tahun 1979 telah melakukan penelitian dengan judul “*The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*”, dan telah mengungkapkan adanya rasionalitas ekonomi para petani di pedesaan Vietnam. *Kedua*, Jeannine Murphy, yang pada tahun 2007 telah melakukan penelitian dengan judul “*The Individual Versus The Institution: Analysis of Power Relation in Irish Society*”, dan telah mengungkapkan adanya peran kekuasaan (*power*) berbasis kelas pada masyarakat Irlandia. *Ketiga*, Henry Silka Innah dan kawan-kawan, yang pada tahun 2012 telah melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinamika Jejaring Aktor Dalam Reforestasi di Papua”, dan telah mengungkapkan adanya potensi konflik pada hubungan antar aktor sehingga membutuhkan relasi kuasa yang memiliki skema resolusi konflik. *Keempat*, Sutaryono, yang pada tahun 2013 telah melakukan penelitian dengan judul “Kontestasi Dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris”, dan telah mengungkapkan

terjadinya marjinalisasi petani di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan memperhatikan penelitian sebelumnya diketahui, bahwa penelitian ini memiliki perbedaan, karena memusatkan perhatian pada upaya mengetahui: (1) isi strategi pertanahan dalam memberdayakan petani, (2) kebutuhan petani yang dapat diapresiasi oleh strategi pertanahan, (3) kemampuan strategi pertanahan memberdayakan petani, (4) makna strategi pertanahan bagi para pihak, (5) relasi kuasa yang berpotensi muncul saat diterapkannya strategi pertanahan.

Sebagaimana diketahui strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan haruslah meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang relevan atau bersesuaian dengan Empat Prinsip Pengelolaan Pertanahan yang dicanangkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2004, yaitu: *Pertama*, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. *Kedua*, berkontribusi dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. *Ketiga*, berkontribusi dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia, dengan memberi akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama tanah. *Keempat*, berkontribusi dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari (lihat Nugroho, 2013:3-4).

Khusus mengenai kesejahteraan, sejak tahun 2008 BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mempromosikan “ukuran” kesejahteraan, sebagai berikut: *Pertama*, pemenuhan kebutuhan dasar, yang terdiri dari: (1) pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan yang standar, (2) pemenuhan kebutuhan sandang atau pakaian yang standar, (3) pemenuhan kebutuhan papan atau tempat tinggal, (4) pemenuhan kebutuhan kesehatan, dan (5) pemenuhan kebutuhan pendidikan. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis, yang terdiri dari: (1) pemenuhan kebutuhan ibadah, (2)

pemenuhan kebutuhan makan protein hewani, (3) pemenuhan kebutuhan pakaian yang baik, (4) pemenuhan kebutuhan ruang untuk interaksi keluarga, (5) pemenuhan kebutuhan penghasilan yang mencukupi, (6) pemenuhan kebutuhan baca tulis latin, dan (7) pemenuhan kebutuhan keluarga berencana. *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan pengembangan, yang terdiri dari: (1) pemenuhan kebutuhan peningkatan keagamaan, (2) pemenuhan kebutuhan menabung, (3) pemenuhan kebutuhan berinteraksi dalam keluarga, (4) pemenuhan kebutuhan ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) pemenuhan kebutuhan untuk mampu memperoleh informasi. *Keempat*, pemenuhan kebutuhan untuk menyumbang bagi keberlanjutan masyarakat, yang terdiri dari: (1) pemenuhan kebutuhan untuk secara teratur menyumbang dalam bentuk uang bagi kepentingan sosial, serta (2) pemenuhan kebutuhan untuk berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan, dan sebagainya (lihat Nugroho, 2014: 4-6).

Ketika strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan diterapkan, maka strategi tersebut memiliki dua unsur penting, sebagai berikut: *Pertama*, isi strategi pertanahan, yang terdiri dari: (1) strategi dalam penguasaan dan pemilikan tanah, dan (2) strategi dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. *Kedua*, akomodasi kebutuhan petani dalam strategi pertanahan, yang terdiri dari: (1) pencapaian keadilan dan kesejahteraan, dan (2) terwujudnya harmoni sosial dan prospek keberlanjutan.

Strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan inilah yang selanjutnya dimaknai oleh pihak-pihak terkait, yang sesuai tujuannya dapat dimaknai sebagai instrumen untuk memberdayakan petani melalui proses revitalisasi kesadaran agraris, solidaritas agraris, dan keberdayaan agraris. Saat proses itu berlangsung, maka makna strategi pertanahan akan diberikan oleh pihak-pihak yang terkait langsung, yaitu Pemerintah Desa Prigelan, Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan, seluruh kelompok tani yang ada di Desa Prigelan, dan para petani di Desa Prigelan.

Ikhtiar agar isi strategi pertanahan mampu mengakomodasi kebutuhan petani, dan dapat diakui sebagai instrumen yang memberdayakan petani, serta dapat dimaknai sesuai tujuannya oleh pihak-pihak yang terkait

langsung; akhirnya memunculkan relasi kuasa dalam memberdayakan petani. Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya (lihat Thomas, 2004:10).

Relasi kuasa para pihak sehubungan dengan adanya strategi pertanian Pemerintah Desa Prigelan, terdiri dari relasi antara pihak-pihak, sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa Prigelan, sebagai pihak yang menetapkan strategi pertanian; (2) petani, sebagai pihak yang menjadi sasaran strategi pertanian; (3) kelompok tani, sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan petani; (4) gabungan kelompok tani, sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan kelompok tani.

Adanya relasi kuasa akibat strategi pertanian Pemerintah Desa Prigelan berpotensi menimbulkan konflik. Namun demikian diketahui, bahwa saat konflik telah berada dipuncak dalam bentuk kemacetan, maka konflik akan menurun dan menuju tahap pengurangan (*de-escalation*), yang selanjutnya mengalami negosiasi dalam rangka mencapai konsensus. Sumber konflik meliputi: *Pertama*, pemaknaan tanah oleh *stakeholders*, yang meliputi perbedaan makna tanah menurut pemerintah desa, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. *Kedua*, hak dan akses atas tanah, yang meliputi kepemilikan serta akses terhadap keuntungan dan nilai-nilai pertanian yang dianut. *Ketiga*, kontestasi antar aktor, yaitu: pemerintah desa, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani.

Dinamika kekuasaan dan relasi kuasa (*power relation*) merupakan faktor yang telah melipat-gandakan dan menjadi penyebab merebaknya kemiskinan (*poverty*). Serangan komprehensif terhadap kemiskinan dan ketidak-setaraan (*inequality*) berasal dari kekuasaan (*power*), termasuk peran konstruktif dan destruktif kekuasaan. Pendekatan untuk mereduksi kemiskinan seringkali mengabaikan kebutuhan utama masyarakat, serta meremehkan (*underestimate*) dan mengabaikan relasi kuasa yang justru memelihara kemiskinan (Moncrieffe, 2004:7-11).

Angus Stewart (dalam Agusta, 2008:266-267) membagi kekuasaan dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, kekuasaan yang hadir dalam bentuk dominasi, yang dikenali sebagai kekuasaan meliputi (*power over*) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan, melalui mobilisasi sumberdaya. Selain itu, kekuasaan juga sejajar dengan otoritas, sehingga memiliki keresmian dan legitimasi, untuk mendesakkan keinginan kepada orang lain; *Kedua*, kekuasaan yang hadir dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan terhadap (*power to*) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai wujud otonomi masyarakat, melalui proses intersubjektif yang mampu menciptakan solidaritas bersama.

Keberadaan *power over relation* dan *power to relation* relevan dengan definisi yang diungkapkan Robert A. Dahl (1957:201). Baginya kekuasaan (*power*) merupakan terma (istilah) relasi antar orang (manusia), yang dinotasikan dalam simbol sederhana. Ia (1957:202) juga mengungkapkan, bahwa para ilmuwan tidak hendak memproduksi satu teori tentang kekuasaan, misal: *Theory of Power*, melainkan para ilmuwan cenderung memproduksi beraneka-ragam teori, yang masing-masing dengan cakupan terbatas.

Kekuasaan dapat bersifat konfliktual (*conflictual*) dan koersif (*coercive*), sehingga ia perlu dibangun melalui konsensus (*consensus*) dan legitimasi (*legitimacy*). Kekuasaan bukanlah hal sederhana yang ada dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus dikultivasi (*cultivated*). Kekuasaan tidak akan kehilangan kekuatannya, bila ia digunakan dengan memanfaatkan berbagai taktik untuk mempengaruhi berbagai agenda. Kekuasaan merupakan wujud adanya kewenangan yang legitimate (Moncrieffe, 2004:26-27).

Kekuatan kekuasaan semakin nampak, ketika pandangan Marx, Weber, dan Gramsci diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga adalah orang-orang yang menekuni teori kekuasaan pada masyarakat berbasis kelas. Karl Marx (1818-1883) mengeksplorasi kekuasaan dalam relasinya dengan buruh, kelas, ekonomi, dan sistem kapitalisme. Menurut Marx, di bawah kapitalisme para pekerja dipaksa menjual tenaganya kepada

kaum kapitalis, yang akan menggunakan tenaga ini untuk mengakumulasi modal lebih banyak, untuk meningkatkan kekuasaan kaum kapitalis atas para pekerja.

Sementara itu, Max Weber (1864-1920) sepakat tentang perlunya distribusi kekuasaan dalam proses yang berkaitan dengan buruh. Weber mengeksplorasi kekuasaan dalam terma kewenangan (*authority*) dan manajemen dalam birokrasi negara. Menurut Weber, kekuasaan adalah kesempatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan sikapnya terhadap suatu tindakan komunal, termasuk menentang orang lain yang berpartisipasi pada tindakan komunal tersebut. Berbeda dengan Marx dan Weber, Antonio Gramsci (1891-1937) mengajukan teori hegemoni sebagai perspektif, untuk menganalisis struktur dan agensi. Teori hegemoni mendasarkan diri pada pandangan Kaum Marxis, yang bergerak melintasi reduksionisme ekonomi (Murphy, 2007:12-19).

Kekuasaan berbasis kelas tidaklah sepenuhnya benar, karena Foucault (dalam Sutrisno, 2005:154) menjelaskan, bahwa kekuasaan bukan milik sipapun, kekuasaan ada di mana-mana, dan kekuasaan adalah strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subyek. Oleh karena itu, kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga dapat melalui normalisasi dan regulasi.

James C. Scott (1981 dan 2000) menjelaskan, bahwa ketika para petani (*peasant*) mendapatkan ketidak-adilan, maka mereka tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan melakukan resistensi. Strategi perlawanan ini (resistensi) dimaksudkan untuk mempertahankan diri dengan cara-cara yang lunak demi kelangsungan hidupnya. Perlawanan semacam ini oleh beberapa pihak sering tidak diakui sebagai perlawanan, karena tindakannya tidak mengancam pemilik kuasa (*power*). Bentuk resistensi antara lain tidak ikut gotong royong, berbohong, ngemplang, dan

sabotase. Bentuk perlawanan tidak frontal ini dapat terjadi, karena adanya moralitas petani yang lebih mementingkan keselamatan (keselarasan) dibanding konflik.

Pendapat James C. Scott dijernihkan oleh Samuel Popkin (1979), yang menyatakan, bahwa tindakan petani tidak semata-mata karena moralitas petani, melainkan karena pertimbangan rasional. Resistensi muncul dari kesadaran untuk memilih tindakan terbaik dan paling menguntungkan bagi petani. Caranya antara lain dengan beralih ke pekerjaan lain (non pertanian), cara ini lebih efisien daripada melakukan protes atau menentang penguasa.

Hubungan para aktor dapat berwujud kerjasama, bahkan dapat menimbulkan konflik, sehingga untuk memelihara relasi tersebut, diperlukan skema resolusi konflik atau penyeimbangan kekuasaan antar aktor. Hubungan masing-masing aktor dalam ranah pengelolaan sumberdaya alam juga ditentukan oleh ideologi politik/kekuasaan dan orientasi ekonomi yang dianut aktor (Innah, 2012:98).

Berbekal kerangka teoritik dan konseptual sebagaimana yang telah diuraikan, maka penelitian berjudul “Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo)” ini dilakukan dengan menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik. Secara keseluruhan ada 13 (tiga belas) orang informan dalam penelitian ini, walaupun secara metodologis (kualitatif) jumlah informan tidaklah ditentukan secara rigid, karena bersifat situasional dan kondisional. Informan dipilih dengan teknik menjangring informan yang dalam hal ini dilakukan secara *purposive*, agar dapat diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong, 2007:224). Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara Kualitatif.

B. Strategi Pertanian Pemerintah Desa

Untuk memberdayakan para petani di Desa Prigelan, maka Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pertanian, sebagai berikut: *Pertama*, strategi penguasaan tanah, berupa pemberian hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin, bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Strategi ini diberlakukan atas dukungan para pemilik tanah sawah, yang menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani.

Berkaitan dengan strategi penguasaan tanah, Untung (Ketua Kelompok Tani “Kunir Maju) tidak sepenuhnya setuju atas strategi yang diterapkan ini. Menurut Untung keliru, ketika strategi ini hanya diberlakukan pada para pemilik tanah sawah, karena hal ini berarti yang membiaya kegiatan desa (ronda malam dan kerjabakti) hanyalah para pemilik tanah sawah. Padahal yang menikmati pembangunan desa bukan hanya pemilik tanah sawah, tetapi seluruh warga desa, termasuk orang-orang kaya yang tidak memiliki tanah sawah, tetapi memiliki usaha lain (warung, toko, pedagang, penyedia jasa, atau pegawai) sehingga punya rumah besar dan bagus, serta kendaraan atau mobil yang bagus. Oleh sebab itu, Untung menganggap hal ini tidak adil. Untung menjelaskan, seharusnya mereka yang tidak punya tanah sawah tetapi relatif sejahtera, tetap bisa diminta untuk membayar kewajiban yang setara dengan $\frac{1}{6}$ bagian dari luas pemilikan tanah sawah, misalnya dalam bentuk uang yang setara dengan $\frac{1}{6}$ hasil panen atas tanah sawah seluas 360 ubin.

Kedua, strategi pemilikan tanah, berupa larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan warga (penduduk) Desa Prigelan. Sebaliknya, orang-orang yang bukan warga Desa Prigelan dilarang membeli bidang-bidang tanah di Desa Prigelan. Strategi ini diberlakukan atas dukungan para pemilik tanah, yang bersedia memenuhi ketentuan Peraturan Desa Prigelan yang mengatur hal ini. Saat ini berlaku Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013,

yang pada lampirannya (Bagian VI angka 1) menetapkan, “Pemindahan/ mutasi hak milik tanah sawah dan darat ke warga luar Desa Prigelan tidak dilayani, kecuali putra desa”.

Berkaitan dengan strategi pemilikan tanah, Bambang Herlambang (Ketua Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok) mengkritik strategi ini yang melarang orang luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan. Menurut Bambang Herlambang strategi ini menyulitkan warga Dusun Gamblok yang karena letaknya yang “nggamblok” (menempel di sisi Barat), kadang terlupakan dalam hal penerimaan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Bambang Herlambang memberi kesaksian, bahwa jumlah anak yang menempuh pendidikan tinggi hanya sedikit. Saat ini baru ada dua keluarga yang mampu menyekolahkan anaknya ke pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan sulitnya kepala keluarga di Dusun Gamblok dalam memenuhi biaya anaknya ke pendidikan tinggi. Bila mereka ingin menjual tanahnya mengalami kesulitan, karena orang luar Desa Prigelan tidak boleh membeli tanah di Desa Prigelan, sedangkan orang Prigelan tidak ada yang mau membeli tanah dengan harga yang ditawarkan.

Ketiga, strategi penggunaan tanah, berupa upaya mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya, misal kebun campuran dan non pertanian. Strategi ini diberlakukan atas dukungan gabungan kelompok tani, kelompok tani, dan para petani di Desa Prigelan. Para pendukung berkepentingan dengan strategi ini, karena berkaitan dengan kepentingan profesionalitas mereka. Strategi ini dapat diterapkan, karena irigasi di desa ini tergolong baik, dan distribusi air dari Bendungan Wadas Lintang relatif lancar. Irigasi yang ada di desa ini telah diupayakan oleh para kepala desa sejak dijabat oleh Wongsodiharjo (sebelum tahun 1946), kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Suparmin (tahun 1946 – 1986), dan akhirnya oleh Suparno (tahun 1986 – 2002). Pada masa jabatan Suparno inilah, irigasi tersier dibangun di Desa Prigelan, hingga tanah sawah dapat dua kali ditanami padi dan satu kali ditanami kedelai.

Keempat, strategi pemanfaatan tanah, berupa optimalisasi bidang-bidang tanah yang ada di Desa Prigelan. Wujud strategi ini berupa

pemanfaatan tanah bagi usaha tanaman “primadona”, yaitu padi dan kedelai. Sebagaimana strategi penggunaan tanah, strategi pemanfaatan tanah diberlakukan atas dukungan gabungan kelompok tani, kelompok tani, dan para petani di Desa Prigelan. Seperti pada strategi penggunaan tanah, para pendukung strategi pemanfaatan tanah berkepentingan dengan strategi ini, karena berkaitan dengan kepentingan profesionalitas mereka.

C. Makna Strategi Pertanahan

Strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan memiliki makna yang berbeda pada berbagai pihak, seperti: *Pertama*, makna strategi pertanahan bagi Pemerintah Desa Prigelan, merupakan wujud pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Desa Prigelan tahun 2012 – 2017. Sebagaimana diketahui visi Pemerintah Desa Prigelan adalah, terwujudnya Desa Prigelan yang beriman, aman, damai, sehat, dan sejahtera lahir-batin, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dan swadaya masyarakat. Sementara itu, misi Pemerintah Desa Prigelan adalah: (1) meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) meningkatkan sumberdaya masyarakat, (3) meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat, (4) mewujudkan keamanan dan ketertiban, (5) meningkatkan sarana prasarana dasar permukiman, (6) melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa, serta (7) meningkatkan produksi pertanian dan peternakan.

Kedua, makna strategi pertanahan bagi Gabungan Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Prigelan, merupakan upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi Gabungan Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Prigelan. Relevansi nampak nyata ketika strategi pertanahan tersebut memberi jalan bagi masuknya bantuan kepada para petani dan kelompok tani melalui Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan.

Ketiga, makna strategi pertanahan bagi seluruh kelompok tani di Desa Prigelan tidaklah sama. Ada beberapa kelompok tani yang mendukung sepenuhnya strategi pertanahan karena relevan dengan tugas dan fungsi kelompok tani, khususnya dalam memberdayakan para petani. Tetapi ada

pula beberapa kelompok tani yang tidak sepenuhnya mendukung strategi pertanahan, seperti: (1) Kelompok Tani “Kunir Maju” Dusun Kuniran, yang mengkritik strategi penguasaan tanah; dan (2) Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok, yang mengkritik strategi pemilikan tanah.

Keempat, makna strategi pertanahan bagi para petani di Desa Prigelan adalah, sebagai berikut: (1) sesuatu yang bermanfaat buat petani, karena memberi kesempatan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, untuk menggarap tanah sawah; (2) sesuatu yang melindungi penghasilan petani, karena para petani di Desa Prigelan mendapat kesempatan secara penuh untuk memperoleh penghasilan dari tanah sawah yang ada di desa ini; dan (3) sesuatu yang mampu memberi penghasilan buat petani, karena petani berkesempatan untuk menanam padi dan kedelai di atas tanah sawah.

D. Format Relasi Kuasa di Desa

Politik kekuasaan Pemerintah Desa Prigelan merupakan aspek penting, yang melatar-belakangi penerapan strategi pertanahan dalam memberdayakan petani. Berdasarkan politik kekuasaan yang dipraktekkan Pemerintah Desa Prigelan, maka muncul format relasi kuasa di Desa Prigelan, sebagai berikut: *Pertama*, adanya upaya untuk menerapkan *power over relation*, agar tujuan untuk memberdayakan petani dapat tercapai, dengan memainkan relasi kuasa sebagai instrumen pencapai tujuan, dan instrumen mobilisasi sumberdaya.

Power over relation terlihat dalam *positioning* perangkat desa yang menjamin pencapaian tujuan strategi pertanahan, terutama nampak pada jabatan mereka yang berkaitan dengan petani, seperti: (1) Sutrisno, yang menjabat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Pemerintah Desa Prigelan, memiliki jabatan yang berkaitan dengan petani, yaitu Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan. (2) Sudarmono, yang menjabat Kepala Dusun Krajan Kulon pada Pemerintah Desa Prigelan, memiliki jabatan yang berkaitan dengan petani, yaitu: (a) Ketua Kelompok Tani “Karya Tani II”, dan (b) Ketua Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur”.

Jabatan rangkap perangkat desa yang merambah gapoktan dan kelompok tani memperlihatkan upaya serius Pemerintah Desa, untuk menjamin keberhasilan strategi pertanian. *Power over relation* sungguh-sungguh difungsikan sebagai instrumen pencapaian tujuan, karena “dikawal” oleh perangkat desa yang rangkap jabatan (ketua gapoktan dan kelompok tani). Nilai-nilai yang terkandung dalam strategi pertanian juga menjadi tanggung-jawab perangkat desa yang rangkap jabatan, sehingga Kepala Desa Prigelan tidak perlu khawatir atas kegagalan strategi pertanian. Peranan perangkat desa yang rangkap jabatan penting bagi penerapan strategi pertanian, termasuk bagi kehidupan para petani di Desa Prigelan.

Kedua, adanya upaya memperlihatkan *power to relation*, agar para petani mengerti atas itikad baik Pemerintah Desa Prigelan, dengan memainkan relasi kuasa sebagai instrumen otonomi petani, dan instrumen pemenuhan solidaritas. Meskipun menerapkan *power over relation*, terutama sebagai instrumen pencapaian tujuan dan instrumen mobilisasi sumberdaya; Pemerintah Desa Prigelan berupaya untuk memperlihatkan *power to relation* kepada masyarakat dan petani Desa Prigelan. Bagi Pemerintah Desa Prigelan strategi pertanian yang secara konsisten diterapkannya merupakan bentuk *power to relation*. Kapasitas isi strategi pertanian, yang terdiri dari strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; berupaya mengakomodasi kebutuhan petani, seperti: keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.

Power to relation perlu diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Prigelan dalam upaya membangun citra diri yang didasarkan pada hal-hal yang dimilikinya, misal konsistensi dalam menerapkan strategi pertanian. Citra diri tidak dibangun dari kesejati-dirian atau diri yang ideal, melainkan dari pemilikan (*to have*) yang ada pada Pemerintah Desa Prigelan. Semangat *power to relation* memberi bekal pada Pemerintah Desa Prigelan untuk menangkap gejala dan aspirasi para petani di desa ini, sehingga Pemerintah Desa Prigelan berkesempatan untuk menerapkan strategi pertanian, saat para petani sadar dalam keteraturan atas kebermaknaan strategi tersebut.

E. Penutup

Relasi kuasa dalam pemberdayaan petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh Pemerintah Desa Prigelan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani, yang berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan. Hal ini terwujud, karena strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris dalam “dosis” Desa Prigelan. Oleh karena itu, strategi pertanahan dimaknai, sebagai berikut: (1) bagi Pemerintah Desa Prigelan merupakan wujud pelaksanaan visi dan misi; (2) bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan merupakan upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi gapoktan; (3) bagi kelompok tani merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi petani, meskipun ada pula yang memaknainya sebagai sesuatu yang tidak adil; serta (4) bagi petani merupakan sesuatu yang bermanfaat, melindungi, dan memberi penghasilan pada petani. Kesemua ini tercapai setelah Pemerintah Desa Prigelan mampu memainkan relasi kuasa yang unik, yaitu berupa penerapan *power over relation* seraya memperlihatkan *power to relation*.

Daftar Pustaka

- Agusta, Ivanovich. 2008. “Resensi Buku: Teori Kekuasaan, Teori Sosial, dan Ilmuwan Sosial.” *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Volume 2, Agustus, 2008.
- Azwar, Saifuddin. 1998. “Metode Penelitian.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dahl, Robert A. 1957. “*The Concept of Power*.” Yale University.
- Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. 2013. “Pengawasan Bansos Pascapanen Kedelai Di Kabupaten Purworejo.”
- Innah, Henry Silka. (et.al.). 2012. “Peran Dinamika Jejaring Aktor Dalam Reforestasi di Papua.” *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Volume 9 Nomor 2 Juni 2012.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. “*Collins: Dictionary of Sociology*.” Glasgow, Harper Collins Publishers.

- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Moncrieffe, Joy M. 2004. "Power Relations, Inequality, and Poverty." London, Overseas Development Institute.
- Muhajir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Murphy, Jeannine. 2007. "The Individual Versus The Institution: Analysis of Power Relation in Irish Society." Waterford Institute of Technology.
- Nugroho, Aristiono (et.al.). 2011. "Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial Landreform Lokal." Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2013. "Resonansi Landreform Lokal." Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2014. "Tanah Hutan Rakyat." Yogyakarta, STPN Press.
- Popkin, Samuel. 1979. "The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam." Berkeley, University of California Press.
- Purworejo News. 2010. "Bupati Berikan Bantuan Kepada 20 Kelompok Tani."
- Ritzer, George. 1985. "Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda". Jakarta, Rajawali.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media.
- Scott, James C. 1981. "Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara." Jakarta, LP3ES.
- Scott, James C. 2000. "Senjatanya Orang Yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani." Jakarta, Yayasan Obor.
- Sindonews.com. 2013. "Orang Miskin di Jawa Tengah Capai 4,733 Juta Jiwa."
- Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sorot Purworejo. 2015. "Angka Kemiskinan di Purworejo Masih Tinggi."
- Suara Merdeka Cyber News. 2007. "Petani Kedelai Cemas Hujan Salah Mangsa."

- Sutaryono. 2013. "Kontestasi Dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris." Sidoarjo, Zifatama.
- Sutrisno, Muji dan Hendar Putranto. (ed.). 2005. "Teori-Teori Kebudayaan." Yogyakarta, Kanisius.
- Thomas, Linda. (et.al.). 2004. "*Language, Society, and Power: An Introduction.*" New York, Roudledge.
- Universitas Muhammadiyah Purworejo, Fakultas Pertanian. 2013. "Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2013."
- Veeger, K.J. 1990. "Realitas Sosial." Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. "*Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition).*" Cambridge, Cambridge University Press.